

PELAKSANAAN LELANG BARANG BUKTI *ILLEGAL FISHING*

Oleh :

Reny Wijayanti¹ dan Dwi Haryati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan lelang dan pertanggungjawaban penjual lelang dalam proses pelaksanaan lelang barang bukti *illegal fishing* Polisi Air Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini berjenis normatif-empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang barang bukti *illegal fishing* oleh Polisi Air Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tindakan diskresi yang lebih menekankan pada kemanfaatan dan kepastian hukum guna memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan meminimalisir resiko-resiko yang dapat terjadi. Mengenai pertanggungjawaban Penjual Lelang dalam proses pelaksanaan lelang barang bukti *illegal fishing* oleh Polisi Air Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa secara eksplisit terdapat tanggung jawab Penjual Lelang yang melekat pada Penyidik.

Kata kunci: lelang, *illegal fishing*, polisi air, diskresi.

¹ Reny Wijayanti, Mahasiswa Program S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

THE AUCTION EVIDENCE OF ILLEGAL FISHING

By :

Reny Wijayanti¹ and Dwi Haryati²

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the auction mechanisms and the responsibility of the auction seller in the auction process of auction mechanism implementation of the auction evidence illegal fishing harbour patrols special region of Yogyakarta.

This research is normative-empirical research. The data used consist of primary data obtained through interviews with respondents and secondary data from the research literature. All data and then described and analyzed by descriptively qualitatively.

The result of this research shows that the implementation of illegal fishing evidence auction of harbour patrols special region of Yogyakarta is a discretion act, which more emphasize in the use and the legal certainty in order to facilitate goverment activity, so that the implementation of the auction can be done by minimize the risk which can be occur. The responsibility of auction seller in the process illegal fishing evidence auction of harbour patrols special region of Yogyakarta, that implicitly is the responsibility of the seller auction attached by investigators.

Keywords: auction, illegal fishing, harbour patrols, discretion.

¹ Reny Wijayanti, Student of Magister Kenotariatan Program Law Faculty Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer of Law Faculty Gadjah Mada University, Yogyakarta.